BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang sehat, terampil dan ahli, serta disusun dalam satu program kesehatan dengan perencanaan terpadu yang didukung oleh data dan informasi epidemiologi yang valid.

Pada saat era industry 4.0 dan globalisasi saat ini kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, tepat, dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan keberadaannya karena merupakan sumber utama dalam pengambilan kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan informasi dan komunikasi merupakan kondisi positif yang sangat mendukung berkembangnya sistem informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan, hal ini juga sangat berguna dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pengambilan keputusan bisa lebih mudah jika semua informasi yang dibutuhkan sudah tersedia. Untuk tujuan itu sistem penyusunan dan pembuatan laporan di bidang kesehatan perlu dibangun dengan mengorganisir berbagai data yang telah

dikumpulkan secara sistematik, memproses data menjadi suatu laporan atau informasi yang berguna.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu organisasi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan di bidang kesehatan dan juga fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan. Kinerja pelayanan kesehatan dapat meningkat melalui dua fungsi di atas dipengaruhi oleh aspek sumber daya kesehatan, sumber daya masyarakat dan menajemen kesehatan. Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten seperti yang disebutkan di atas adalah aspek administrasi dan manajemen kesehatan, dimana Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten mempunyai tugas mengelola data dan informasi yang diperoleh baik dari puskesmas, rumah sakit, maupun sarana pelayanan kesehatan yang lain. Sehubungan hal tersebut maka Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten membutuhkan pengelolaan sistem informasi atau aplikasi kesehatan yang baik agar dalam penyusunan dan pembuatan laporan sangat membantu dalam penyusunan anggaran kegiatan dan pengambilan keputusan kebijakan pemerintah bisa lebih.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan. Informasi atau laporan haruslah mempunyai kualitas yang relevan, tepat waktu, dan efisien agar dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan informasi yang dibuat dengan cara manual

mempunyai risiko kebenaran dan keakuratan lebih kecil. Kemungkinan terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja akan lebih besar, sehingga keakuratan informasinya pun berkurang.

Pelayanan kesehatan pada dinas kesehatan khususnya di Puskesmas dilakukan secara sistematis, dan berkelanjutan sehingga setiap pelaksanaan program harus melalui proses perencanaan dan evaluasi pada setiap tahapnya, agar dapat dicapai hasil yang optimal. Adanya data hasil pelayanan kesehatan dan hasil pelaksanaan kegiatan program sangatlah penting karena dari hasilnya laporan yang baik, lengkap dan akuntabel dapat dijadikan acuan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan program pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang. Informasi yang berkualitas dalam pengelolaan manajemen program memberikan kepastian data untuk upaya penyusunan dan pembuatan laporan yang efektif dalam penyusunan anggaran ataupun pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan program.

Informasi yang berkualitas pada manajemen institusi memberikan kepastian data pengelolaan organisasi puskesmas yang efektif, sedangkan informasi yang baik pada manajemen sistem akan menimbulkan ketepatan sasaran pembangunan kesehatan wilayah serta transparansi penyehatan masyarakat. Penataan sistem informasi dalam manajemen kesehatan dapat dimulai dengan pengintegrasian transaksi pencatatan dan pelaporan.Hal ini berimplikasi positif kepada pengurangan duplikasi data yang kurang efektif bagi pengambilan keputusan. Tahapan

penataan sistem informasi kesehatan secara dini melalui pengukuran kebutuhan informasi bagi pengelolaan manajemen memerlukan peran serta aktif serta aktif dari penggunaan untuk memberikan hasil desain yang lebih mudah diimplikasikan dalam manajemen organisasi.

Sistem Informasi Kesehatan memberikan dasar-dasar untuk pengambilan keputusan dan memiliki empat fungsi utama : pembuatan data, kompilasi data, analisis dan sintesis data, serta komunikasi dan penggunaan data. Sistem Informasi Kesehatan mengumpulkan data dari sektor kesehatan dan sektor lain dengan analisis data secara keseluruhan yang relevan serta ketepatan waktu dan mengkonversi data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan.

Pemanfaatan data laporan untuk memenuhi kebutuhan administrasi pada jenjang yang lebih tinggi dalam rangka pembinaan, penetapan kebijakan dan dimanfaatkan oleh puskesmas, melalui perencanaan, pergerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian. Selain itu berfungsi untuk petugas di tingkat puskesmas lebih bertanggung jawab dalam mencatat seluruh upaya kesehatan yang dilaksanakannya pelaporan secaran teratur dan tepat waktu serta mampu memanfaatkan data dan informasi dari data berkualitas apabila tepat waktu (*timeliness*), relevan, valid/akurat, presise dan biaya yang layak.

Dampak dari pada keterlambatan pelaporan atau tidak adanya Laporan Bulanan yakni tidak tersedianya data yang *uptodate*yang dapat digunakan sebagai informasi yang akurat/relevan bagi orang yang membutuhkan untuk dijadikan bahan referensi penelitian, dan tanpa

adanya pencatatan dan pelaporan maka tidak adanya umpan balik di lintas sektor dari Puskesmas ke Dinkes Kota, Dinkes Kota ke Dinkes Provinsi, dan Dinkes Provinsi ke Pusat untuk memberikan informasi sistem apa yang mesti di evaluasi kembali untuk memperbaiki mutu dalam pelayanan kesehatan, selain itu tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat dan terdokumentasi wujudnya menjadi informasi untuk pengambilan keputusan.

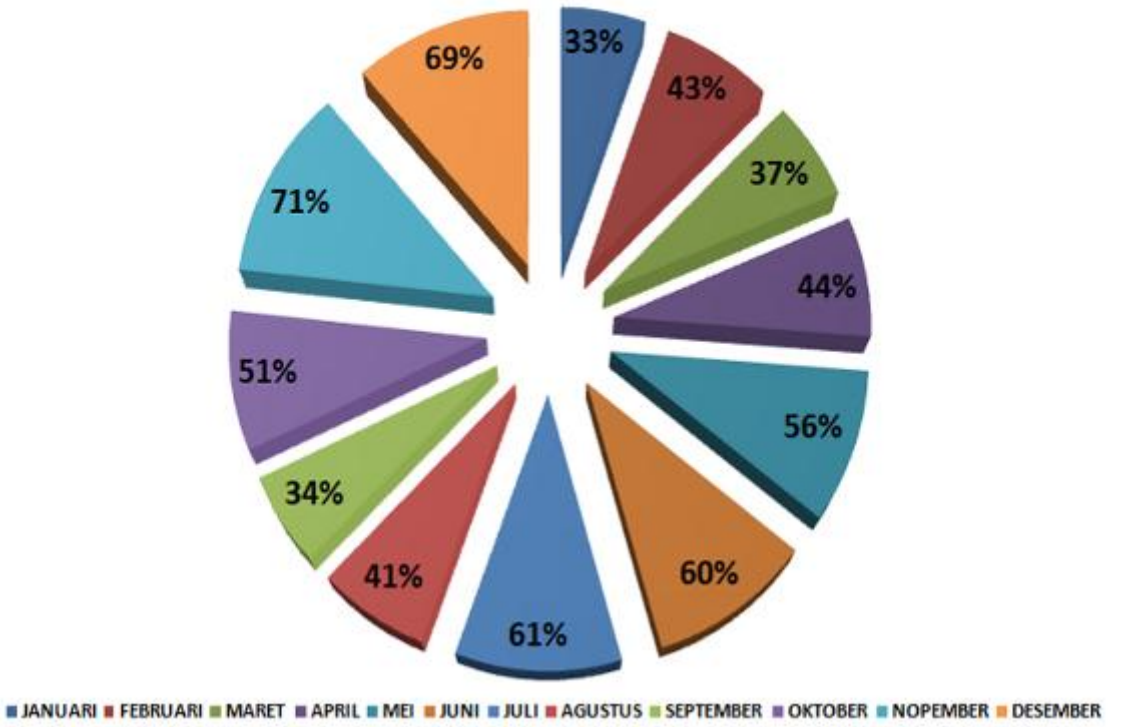
Dinas Kesehatan Kota Parepare merupakan salah satu diantara Dinas dalam lingkup pemerintah daerah yang di golongkan sebagai dinas yang sering mengalami keterlambatan laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh penghitungan data dilakukan secara manual yang dilaksanakan oleh pengelola dan pelaksana program di puskesmas, staf pustu dan poskeskel. Pengelola dan Pelaksana Program memiliki banyak pekerjaan sehingga membutuhkan waktu lama untuk merekap laporan, pengantaran laporan dari puskesmas yang diantar sendiri sehingga membutuhkan waktu.

Dalam gambar dibawah ini jelas terlihat bahwa pada tahun 2019, dari sejumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan imunisasi di dinas kesehatan kota Parepare dapat di gambarkan dari bulan Januari : 33%, bulan Februari : 43%, bulan Maret : 37%, bulan April : 44%, bulan Mei : 56%, bulan Juni : 60%, bulan Juli : 61 %, bulan Agustus : 41%, bulan September : 34 %, bulan Oktober : 51 %, bulan Nopember : 71%, dan Bulan Desember sebesar 69 % hanya beberapa Fasilitas Pelayanan yang

melaporkan kegiatannya secara tepat waktu dan terupdate, Seperti dalam Gambar 1 Dibawah ini.

Gambar. 1

Akurasi Ketepatan Laporan Bulanan



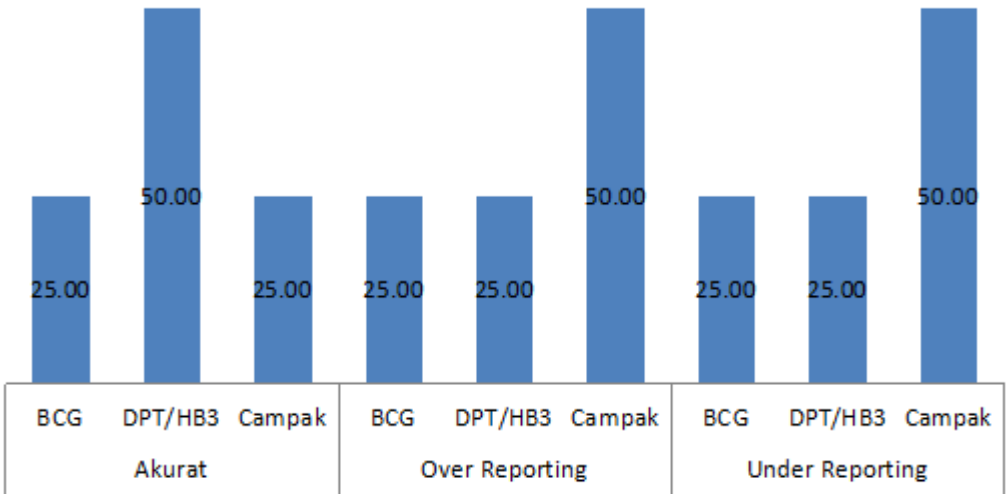
Sumber : Laporan Capaian Program Imunisasi, Profil Dinas Kesehatan Kota Parepare, 2019

Pada Tahun 2019 berdasarkan laporan yang terkirim ke dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kota Parepare termasuk salah satu dinas kabupaten / kota masuk dalam kategori yang datanya masih tidak akurat data, terlihat dengan adanya data Imunisasi BCG 25 % yang kurang akurat dalam pengentrian penuliasan dengan tidak ditemu akan data secara by name dan by address, juga ada data yang sering terlambat dalam pengiriman laporan penyelenggaraan program imunisasi di

karenakan laporan harusnya masuk pada tanggal 5 bulan Berjalan tetapi tidak terkirim sesuai dengan tanggal batas yang ditetapkan seperti halnya data DPT Hb-Hib dan Campak yang melebihi batas waktu atau over reporting, sehingga mempengaruhi kualitas data yang ada. ketidakakuratan dan rendahnya kualitas data ini mungkin disebabkan arsip laporan bulanan tidak tersimpan dengan lengkap dan baik dan arsip PWS tidak tersimpan rapi selama 3 tahun,Laporan bulanan dikirim ke kabupaten/kota tidak tepat waktu, arsip PWS dan data UCI selama 3 tahun tidak tersimpanatau under reporting. Seperti dalam Gambar 2 di bawah ini,

Gambar. 2

Akurasi Rasio Kualitas Data Laporan Bulanan



Sumber : Laporan Capaian Program Imunisasi, Profil Dinas Kesehatan Kota Parepare, 2019

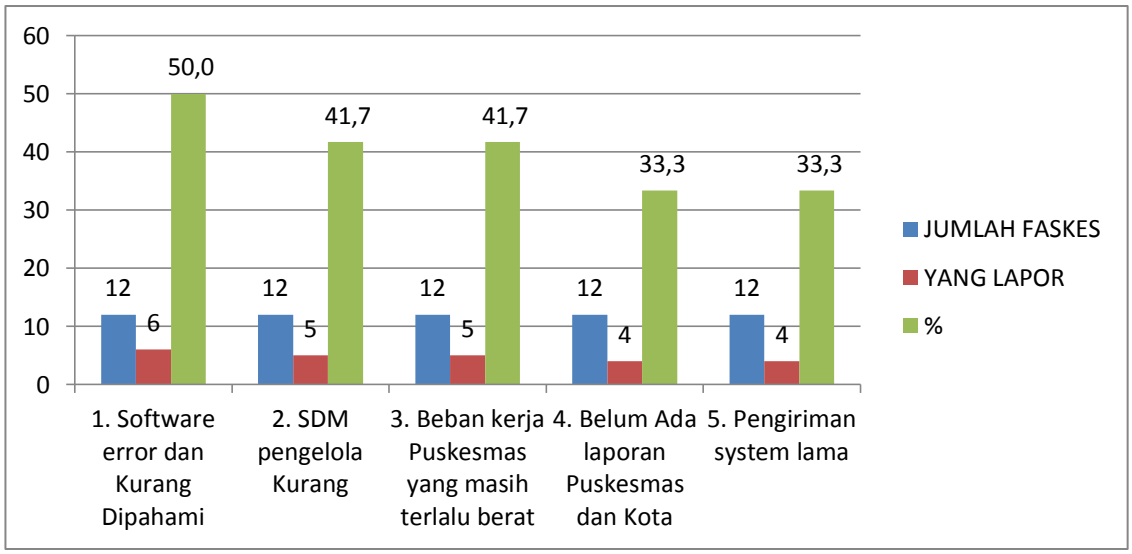
Kondisi tersebut di atas sejalan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini, karena pelaporan kegiatan bulanan yang tidak tepat waktu dan

informasi komunikasi dan administrasi yang kurang terpadu, Yang disebabkan oleh :

1. Software Pusat yang berat dan sering error dan Kurang Dipahami
2. SDM pengelola program belum menguasai program Microsoft excel
3. Beban kerja Puskesmas yang masih terlalu berat, Petugas Pelayanan program imunisasi yang rangkap tugas
4. Belum Adanya penyeragamkan format laporan Puskesmas dan kabupaten
5. Pengiriman laporan yang masih menggunakan system lama

Gambar 3

Presentase Masalah yang Dihadapi



Sumber : Capaian Program Imunisasi, Profil Dinas Kesehatan Kota Parepare, 2019

Dapat dijelaskan dari Gambar 3 diatas bahwa muncul masalah dalam penggunaan system ini dikarena adanya software system yang

selalu error dan kurangnya pemahaman, dimana dilihat dari 12 Fasilitas layanan yang menggunakan system tersebut ada 6 (50 %) Fasilitas Pelayanan yang mengeluhkan keadaan tersebut, begitupun halnya dengan SDMK pada Fasilitas Kesehatan tersebut yang kurang pemahaman akan system tersebut dimana dari 12 Fasilitas Kesehatan yang ada, ada 5 (41,7%) yang petugas pencatatan dan pelaporannya yang kurang paham terhadap penggunaan system tersebut.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah menganalisa Pengelolaan data pelayanan dan pelaksanaan imunisasi dalam bentuk laporan program dari fasilitas pelayanan kesehatan yang efektif dengan menggunakan sistem pemantauan wilayah setempat program imunisasi dalam membuat, menyajikan dan menginterpretasi laporan ke Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga menghasilkan laporan program yang di harapkan, untuk memberikan informasi sistem apa yang mesti di evaluasi kembali untuk memperbaiki mutu pelaporan, apakah dengan meneliti aplikasi pemantauan wilayah setempat yang sudah digunakan atau dengan mengganti aplikasi atau system pencatatan dan pelaporan yang baru, selain itu tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat dan terdokumentasi wujudnya menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Sumber Laporan yang menjadi lokus penelitian dengan menggunakan metode : observasi, telaah dokumen dan wawancara

adalah 8 (Delapan) Puskesmas dalam wilayah kerja dinas kesehatan Kota Parepare.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukanpengkajian dan menganalisaproses pengelolaan data program imunisasidan bagaimana implementasi / pelaksanaan (penggunaan) sistem pemantauan wilayah setempat terkait teknis pengelolaan data program Imunisasi secara efektif dan efisien di Dinas kesehatan Kota Pareparemaupun di puskesmascempae, untuk menghasilkan sebuah laporan program, dengan mengganti sistem pencatatan dan pelaporan yang nlama dalam pemantauan wilayah setempat dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang baru sehingga penggunaan softwareatau system tersebut dapat digunakan secara efektif dan efesien dalam pelaksanaannya di puskesmas, maupun dengan melalukan uji coba penggunaan aplikasi atau system baru pada puskesmas tertentu, yang nantinya akan menghasilkan output sebuah laporan yang efektif dan akurat dalam pencatatan dan pelaporan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkonstribusi dalam hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, yaitu dapat memberikan konstribusi bagi pengembangan ilmu, terutama melalui pengujian konsep dan kebijakan secara empiris guna menemukan atau mengembangkan konsep/kebijakan baru sebagai suatu pemikiran dalam memajukan Manajemen data Program imunisasi.
2. Kegunaan Praktis, yaitu: (a) menerapkan desain pelaksanaan pengelolaan data Program imunisasi, dan (b) desain systempengelolaan data Program Imunisasi dapat digunakan sebagai rujukan pelaksana program imunisasi di puskesmas yang ada di Dinas Kesehatan Kota Parepare.